

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum YBM BriLian

a. Sejarah singkat Berdirinya YBM BriLian

Pada tahun 1990, semangat masyarakat muslim di Indonesia semakin beranjak naik, demikian pula semangat untuk melaksanakan ajarannya. Contohnya, kewajiban membayar zakat yang sekian lama rukun Islam nomer empat ini termajinalkan, sehingga aspek sosial yang terkandung didalamnya tak mempunyai arti sedikitpun, kini masyarakat sudah mulai sadar mengeluarkan zakat bahkan sebagian besar mengerti bahwa didalam zakat terdapat potensi besar yang bisa dikembangkan, khusus bagi delapan ashnaf (golongan) yang berhak menerima zakat. Kondisi ini ditandai dengan bermunculannya lembaga- lembaga pengelola ZIS diberbagai perusahaan swasta maupun BUMN.

Semangat masyarakat muslim dan kesadaran akan besarnya potensi zakat, infaq dan sedekah tersebut juga terjadi di omunitas lingkungan BRI. Pada tahun 1992 dengan diprakarsai oleh bapak Winarto Soemarto yang waktu itu menjabat sebagai salah satu direksi telah maelakukan langkah- langkah dasar dengan memasukan zakat sebagai salah satu bagian dari program kerja

BAPEKIS. Waktu itu dinamai seksi sosial dan Zakat. Namun perkembangan selanjutnya sampai menjelang masuk tahun 2000 belum optimal, hal ini disebabkan salah satunya adalah belum dikelola secara khusus dan dengan pekerja yang khusus pula.

Selanjutnya pada tahun 2001, tahun dimana bangsa qt dilanda Selanjutnya pada tahun 2001, tahun dimana bangsa kita di landa krisis ekonomi yang berkepanjangan dengan bertambahnya jumlah orang miskin di Indonesia, dan dengan melihat besarnya potensi ZIS di lingkungan BRI yang belum optimal. Di samping itu tuntutan profesionalisme dan besarnya permasalahan yang melingkupi pengelolaan ZIS, maka pada tahun tersebut dengan di prakarsai BAPEKIS BRI dan dengan di ilhami oleh semangat keagamaan, kepedulian sosial yang tinggi dan dorongan Bapak Rudjito sebagai Dirut BRI, bank BRI di pandang perlu membentuk Yayasan tersendiri yang khusus mengelola dana ZIS.

Dalam proses awal upaya optimalisasi zakat di lingkungan BRI dan sebelum di sepakati untuk mendirikan Yayasan tersendiri yang khusus mengelola zakat, BAPEKIS berkonsultasi dengan para tokoh zakat yang terdiri dari Bapak Eri Sodewo (CEO Dompot Dhuafa Republika, Bapak KH. Dr. Didin Hafiduddin (ahli Zakat dan Dewan Syariah DD Republika), Bapak Dr. Said Agil Husain Al Munawwar (Guru Besar IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta), di samping itu mengadakan kunjungan ke BAMUIS BNI

46.

Hasil dari konsultasi tersebut di rumuskan oleh BAPEKIS dan di konsultasikan ke direksi BRI. Para direksi sangat merespon usulan tersebut dan meminta BAPEKIS segera menyiapkan segala persyaratan pendirian Yayasan.³

Maka pada tanggal 10 Agustus 2001 para Direksi yang terdiri dari Bapak H. Rudjito (Dirut), Bapak H. Akhmad Amien Mastur, Bapak H. Ahmad Askandar, Bapak Hendrawan Tranggana, Bapak Krisna Wijaya, Ibu Hj. Gayatri Rawit Angreni (Direktur), Pegurus BAPEKIS BRI KANPUS, Pemimpin Wilayah dan para Pejabat di KANPUS yang bertempat di ruang rapat direksi sepakat mendirikan Yayasan yang dinamai Yayasan Baitul Maal-Bank Rakyat Indonesia Akte Notaris No. 52 tahun 2001 di Notaris Agus Madjid SH. Dengan Bapak H. Purwantosebagai ketua Yayasan.

Pada waktu di sepakati pendirian YBM BriLian dalam hitungan menit pada waktu itu terkumpul dana sebesar Rp 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) yang di peruntukan untuk dana abadi Yayasan. Setelah pendirian Yayasan, langkah selanjutnya yang di tempuh BAPEKIS adalah membuat Surat Edaran yang isinya himbauan kepada semua pekerja muslim BRI untuk mengisi Surat Kuasa pemotongan gaji untuk Zakat dan Infaq dengan tim konseptor yang terdiri dari Bapak H. Sarwono Sodarto, Bapak H. Purwanto, Bapak H, Prayogo Sedjati mewakili pengurus BAPEKIS dan Bapak Misbahul Munir dan H. Ahmad

Mujahid sebagai pelaksana. Dan sebagai bentuk dukungan dan rasa kepedulian yang tinggi Surat Edaran tersebut di tanda tangani oleh para Direksi.

Menyikapi Surat Edaran tersebut berbagai komentarpun mengalir dari para pekerja BRI, baik yang sangat mendukung maupun yang sangat keberatan. Bentuk keberatan tersebut ada yang melalui lisan bahkan sampai ada yang menulis Surat Keberatan. Tapi perlu di garis bawahi, bahwa keberatan para pekerja tersebut pada intinya bukan keberatan tentang kewajiban zakat itu sendiri atau keberatan terhadap keberadaan YBM BriLian, akan tetapi lebih kepada mereka sudah menyalurkan langsung kepada mustahik dan adanya kekhawatiran tidak optimalnya penyaluran dana zakat tersebut.

Keberatan tersebut harus di jawab dengan prestasi dan dengan kinerja yang baik. Yang penting niat kita baik, ikhlas dan untuk mengemban amanat saudara-saudara kita yang lemah. Insya Allah, semuanya akan berakhir dengan baik. Segala rintangan dan keberatan harus di anggap sebagai cobaan untuk meningkatkan syiar zakat dan untuk berbuat yang terbaik". Demikian sikap yang di ambil para pendiri YBM BriLian dalam menyikapi keberatan tersebut.

Pengembangan selanjutnya setelah dana terkumpul relatif besar, pengurus BAPEKIS memutuskan untuk merekrut orang yang khusus dan sudah berpengalaman mengelola dana zakat dan

kegiatan sosial lainnya dan memberikan otonomi penuh kepada YBM BriLian untuk mengelola dana ZIS tersebut.

Dalam jangka satu tahun, tepatnya pada tanggal 6 November 2002 YBM BriLian di kukuhkan oleh Menteri Agama sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dengan No. SK 445.⁴ dengan pengukuhan tersebut berarti YBM- BRI sudah mendapat legalitas untuk mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah. Tidak hanya terbatas dari zakat pekerja BRI tetapi juga dari masyarakat luar di seluruh Indonesia. Dan dengan pengukuhan tersebut YBM BriLian menjadi salah satu dari 14 Lembaga Zakat di seluruh Indonesia yang berskala Nasional.

Dengan di dirikannya Yayasan Baitul Maal BriLian, di harapkan dapat melengkapi lembaga-lembaga yang telah ada lebih dulu. Seraya berpegang teguh pada prinsip *fastabiqul khairat* dalam mengangkat martabat mustahik (penerima zakat). Dengan komitmen “Mengubah Mustahik Menjadi Muzakki”.

b. Visi dan Misi YBM BriLian

Visi YBM BriLian adalah Menjadi pengelola ZIS terkemuka di Indonesia yang amanah, professional dan sesuai dengan syariat Islam. Bertekad menumbuh kembangkan jiwa dan kemandirian masyarakat yang bertumpu pada sumber daya lokal melalui sistem yang berkeadilan.

Adapun Misi YBM BriLian adalah:

1. Mengoptimalkan pengumpulan dan penyaluran ZIS di lingkungan anggota BriLian dan umat Islam pada umumnya.
2. Meningkatkan pemanfaatan ZIS secara tepat guna dan berhasil guna.
3. Menyelenggarakan kegiatan dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG.
4. Membangun diri menjadi lembaga yang berfungsi sebagai lokomotif gerakan pemberdayaan masyarakat.
5. Menumbuh kembangkan jaringan lembaga pemberdayaan masyarakat.
6. Menumbuh kembangkan dan mendaya gunakan aset masyarakat yang berbasis kekuatan sendiri.
7. Mengadvokasi paradigma ekonomi berkeadilan.

c. Keunggulan Berzakat Melalui YBM BriLian

- 1) Menyalurkan zakat dengan efisien, efektif, dan menjangkau daerah-daerah yang terpencil dan minus di seluruh Indonesia.
- 2) Melibatkan seluruh anggota dalam program “Agen Sosial” dalam bentuk merekomendasikan, monitoring dan membina mustahik yang ada di lingkungan tempat tinggal para pekerja.
- 3) Pembinaan yang Berkesinambungan dan Terukur
 - a) Merekomendasikan binaan YBM BriLian untuk mendapat

KTA(Kredit Tanpa Anggunan).

- b) Pengenalan Binaan pada proses pemodalannya dari perbankan (membina Usaha Kecil menjadi bankable).
 - c) Mengikuti binaan usaha YBM BriLian untuk mengikuti pelatihan usaha kecil yang diadakan kantor Cabang BriLian.
- 4) Mewujudkan masyarakat seimbang dari segi ekonomi, rohani, duniawi, dan ukhrawi.
- a) Mustahik yang dapat dibantu YBM BriLian adalah yang mendapatkan rekomendasi dari masjid sebagai jama'ah aktif.
 - b) Dibina langsung baik yang berkenaan dengan keagamaan maupun manajemen usaha yang merekomendasikan.
 - c) Dibina dimonitor oleh yang merekomendasikan mustahik tersebut.
- 5) Transparan dan Kesesuaian dengan Syariah
- a) Pengawas Internal melalui Dewan Pengawas.

Cara Kerja:

- (1) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
- (2) Mengawasi Pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan.
- (3) Mengawasi Operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup Pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagunaan.
- (4) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan

syari'ah.

b) Diaudit Akuntan Publik.

Cara Kerja:

- (1) Melakukan pencatatan, pendokumentasikan dan pengarsipan transaksi dana ZIS.
- (2) Melakukan pemeriksaan Pengelolaan dana ZIS apakah telah sesuai dengan ketentuan syari'ah dan prinsip akuntansi yang berlaku.
- (3) Penertiban laporan keuangan berkala yang diaudit oleh lembaga

c) Pengawas Syari'ah Melalui Pembina Syariah.

Cara kerja :

- (1) Memberikan nasehat dan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syari'ah dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syari'ah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syari'ah.
- (2) Melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun secara pasif terutama dalam pelaksanaan fatwa Dewan Syari'ah Nasional serta memberikan pengarahan / Pengawasan atas produk / jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syar'ah.
- (3) Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syari'ah Nasional dalam

mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional.

d. Struktur Organisasi YBM BriLian

Sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat, Lembaga Amil Zakat memiliki struktur organisasi yang terdiri dari badan pembina, badan pengawas, pembina syariah, dan badan pelaksana harian. Badan Pembina terdiri dari ketua, wakil ketua, anggota. Fungsi badan Pembina adalah Mempunyai fungsi memberikan pertimbangan fatwa, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas dalam Pengelolaan Lembaga Amil Zakat, Meliputi aspek syariah dan aspek manajerial. Adapun Tugas Pokok Pembina :

1. Memberikan garis-garis kebijakan umum Lembaga Amil Zakat.
2. Mengesahkan rencana kerja Badan Pelaksana dan komisi Pengawas.
3. Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti Lembaga Amil Zakat.
4. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan komisi Pengawas baik diminta maupun tidak.

5. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil Kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
6. Menunjuk Akuntan publik.

Badan pengawas terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota-anggota. Tugas pokok badan pengawas, yaitu:

1. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
2. Mengawasi pelaksanaan kebijaka-kebijakan yang telah ditetapkan dewan pertimbangan.
3. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
4. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah.

Ada juga pembina syariah sebagai perwakilan Dewan syariah nasional yang ditempatkan pada lembaga keuangan syari'ah memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Mengikuti fatwa dewan syariah nasional.
2. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan Dewan syariah nasional.
3. Melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan syariah nasional sekurang- kurangnya satu kali dalam setahun.

Adapun tugas pokok pembina syariah :

1. Memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syari'ah dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syari'ah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syari'ah.
2. Melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun secara pasif terutama dalam pelaksanaan fatwa dewan syari'ah nasional serta memberikan pengarahan / pengawasan atas produk / jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syari'ah.
3. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syari'ah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syari'ah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional.

Badan pelaksana harian memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab atas kelangsungan hidup lembaga.
2. Membuat perumusan dan tujuan, rencana dan kebijakan umum serta mengevaluasi seluruh kegiatan lembaga.
3. Pengambil keputusan-keputusan yang dapat mempengaruhi jalannya kegiatan lembaga.

2. Gambaran Umum Petani Ikan Lele di Tatah Belayung

a. Latar Belakang Petani Ikan Lele

Petani ikan lele di Tatah Belayung pada awalnya dimulai secara perorangan oleh Bapak Irfani Rahman pada tahun 2017. Mereka yang sebelumnya bekerja sebagai buruh bangunan ketika tidak bekerja atau sedang tidak bekerja, menggunakan waktu untuk mengisi waktu luang dengan mencari mata pencaharian baru.

Melihat potensi sungai yang berada di dekat rumah, akhirnya tercetus ide untuk membuat tambak kecil sebagai tambahan pendapatan. Akhirnya diputuskanlah untuk membuat tambak dengan ikan lele sebagai ikannya. Mengingat ikan lele adalah ikan pemakan segala dan dapat hidup diberbagai kondisi termasuk dapat hidup di air dengan derajat keasaman tinggi seperti di sungai Tatah Belayung.

Setelah menjalani pembibitan hingga panen selama 4 bulan, akhirnya ikan lele dapat di panen dan laku di pasar. Melihat kesuksesan dari Bapak Irfani Rahman, akhirnya penduduk sekitar yang rumahnya berada di dekat sungai Tatah Belayung juga mengikuti jejak pak Irfani Rahman dengan membuat tambak dan memilih ikan lele sebagai ikannya. Hingga akhirnya budidaya tambak ikan lele di Tatah Belayung berkembang pesat dan mendapat perhatian pemerhati lingkungan, pemerintah Kota Banjarmasin, dan berbagai yayasan badan amil zakat seperti YBM BriLian.

b. Umur Petani

Umur petani ikan lele di Tatah Belayung bervariasi. Umur petani ikan lele di Tatah Belayung yang paling muda menurut penuturan Bapak Asmuri adalah 35 tahun dan usia paling tua adalah usia 52 Tahun.

c. Pendidikan

Pendidikan petani ikan lele di Tatah Belayung ada yang hanya SD, SMP, dan SMA. Namun kebanyakan dari petani ikan lele di Tatah Belayung berpendidikan SMA/Sederajat.

d. Anggota Kelompok

Anggota setiap kelompok ada 10 orang. Anggota kelompok diputuskan dalam rapat kelompok. Tujuan dari kelompok ini selain saling menunjang dalam usaha budidaya ikan lele, juga sebagai berbagi pengetahuan, baik dalam dari pembibitan, pembelian bahan dan peralatan, perawatan, hingga pemasaran. Setiap kelompok diputuskan berdasarkan wilayah yang berdekatan. Mengingat sekarang ini, wilayah petani ikan lele telah meluas. Tidak hanya di Jalan Tatah Belayung Kelurahan Tanjung Pagar tetapi juga sampai ke Kelurahan Pemurus Dalam.

3. Deskripsi Hasil Wawancara

a. Informan I

Nama : Asmuri

Alamat : Jl. Tatah Belayung Ke.Pemurus Dalam
Kec. Banjarmasin Selatan

Jabatan : Ketua Pokdakan Belayung Mandiri

Dalam implementasi program bantuan YBM brilian kepada petani ikan lele di Tatah Belayung Kecamatan Banjarmasin Selatan, peneliti menggunakan model implementasi Edward III, yaitu komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Deskripsi hasil wawancara kepada informan I dengan model implementasi Edward III berdasarkan dimensi komunikasi adalah sebagai berikut:

1. Dimensi Komunikasi

a. Transmisi

Transmisi merupakan faktor utama dalam hal komunikasi pelaksana kebijakan. Menurut Edward III dalam Agustino (2012:150), penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Transmisi dalam implementasi program bantuan YBM brilian kepada petani ikan lele di Tatah Belayung Kecamatan Banjarmasin Selatan berupa penyampaian atau pengiriman informasi dari pendamping YBM BriLian kepada Kepala Pokdakan kemudian diteruskan kepada petani ikan lele.

Komunikasi transmisi atau penyaluran informasi dari pendamping YBM BriLian kepada kepala Pokdakan dan petani lele yaitu dengan lisan

karena tempat tinggal pendamping YBM BriLian dan petani ikan lele berada di tempat yang sama, yaitu di Kelurahan Tatah Belayung. Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Asmuri selaku Ketua Pokdakan ikan lele di Tatah Belayung mengatakan bahwa:

Awal mula pokdakan di tatah belayung mendapatkan bantuan dari YBM BriLian ini terjadi karena kebetulan pendamping dari YBM BriLian ini dari tatah belayung juga, dan tempat tinggalnya melewati pokdakan belayung mandiri setiap hari kerja dia melihat kegiatan pokdakan belayung mandiri, setelah itu dia mampir ke pokdakan belayung mandiri menawarkan bahwa ini ada bantuan dari Bank BRI semacam dana hibah untuk pemberdayaan masyarakat, setelah itu pokdakan belayung mandiri mengadakan rapat, untuk kelanjutan program bantuan kepada pokdakan belayung mandiri dan mengundang pendamping YBM BriLian. Pendamping menjelaskan bantuan untuk pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu dalam menjalankan usaha budidaya ikan lele ini, yang awalnya keramba punya 2 atau 3 keramba menjadi lebih besar karena adanya tambahan modal dari Bank BRI, sehingga pokdakan menyetujui program ini karena tujuannya juga bagus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pokdakan dapat disimpulkan menyebutkan bahwa transmisi/penyaluran komunikasi yang dilakukan oleh pendamping YBM BriLian sudah efektif, hal ini dapat terlihat dari upaya pendamping YBM BriLian dalam memberikan informasi kepada kepala Pokdakan dan petani lele di Tatah Belayung.

b. Kejelasan

Kejelasan informasi merupakan hal yang penting karena dengan adanya kejelasan komunikasi diharapkan tidak terjadi perbedaan persepsi antara pendamping YBM BriLian, ketua pokdakan, dan petani ikan lele.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Asmuri selaku kepala pokdakan petani lele Tatah Belayung, yaitu:

Kesiapan pokdakan belayung mandiri dalam menjalankan program ini membentuk kelompok atas perintah dari pendamping, jumlah dalam kelompok ada 10 orang, untuk menjalankan program bantuan anggota dari 10 orang ini diminta mengumpulkan data pribadi baik KTP dan kartu keluarga, setelah itu diberikan arahan membuka rekening bank buat kelompok di Bank BRI. Untuk menjalankan program bantuan ini kelompok pokdakan memberikan laporan anggaran belanja, dilaporan itu ada harga dan juga nama barang yang ingin dibeli, setelah itu di cek oleh pihak YBM BriLian bahwasannya anggaran tersebut memang sesuai keperluan dan diterima oleh YBM BriLian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua pokdakan dapat disimpulkan menyebutkan bahwa kejelasan informasi yang dilakukan oleh pendamping YBM BriLian sudah jelas. Hal ini dapat terlihat dari kesiapan belaying mandiri dalam menjalankan bantuan dari YBM BriLian.

c. Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan) agar tidak menimbulkan kebingungan bagi pelakasana di lapangan. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Asmuri selaku kepala pokdakan petani lele di Tatah Belayung mengenai perintah dengan pertanyaan menurut Anda, apa tujuan dilaksanakannya kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

Tujuan utamanya untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu sehingga adanya bantuan ini meningkatkan ekonomi masyarakat, contohnya beli bibit 3.000-5.000 dengan adanya bantuan ini bisa beli bibit sampai 10.000 karena modal membesar sehingga perputaran uangnya juga makin besar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua pokdakan dan dapat disimpulkan menyebutkan bahwa perintah yang dilakukan oleh sudah diketahui oleh ketua pokdakan ikan lele di Tatah Belayung. Hal ini dapat terlihat dari kemampuan ketua pokdakan dalam menjawab pertanyaan dengan tepat terkait indikator perintah.

2. Dimensi Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud adalah ketersediaan staf yang kompeten, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai juga anggaran dan waktu yang tepat untuk melaksanakan kebijakan. Sumber daya merupakan variabel kedua yang sangat menentukan keberhasilan dari sebuah Implementasi suatu kebijakan. Ada 4 elemen dalam dimensi sumber daya, yaitu:

a. Staf

Staf merupakan bagian dari penentu keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan karena staff yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Oleh karena itu, diperlukan staf pelaksana implementasi yang ahli di bidangnya. Hasil wawancara dengan pendamping YBM BriLian dengan pertanyaan Bagaimana proses ditunjuknya petani lele Tatah Belayung Kecamatan

Banjarmasin Selatan sebagai penerima bantuan dari YBM BriLian adalah sebagai berikut:

Saya sering lewat pokdakan ini berangkat kerja. Melihat usahanya sudah jalan dan produktif, maka suatu ketika saya mampir. Lalu saya jelaskan tentang bantuan dari YBM BriLian. Bertukar nomor *handphone*, terus komunikasi akhirnya bantuannya dapat diterima.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping YBM BriLian disimpulkan menyebutkan bahwa elemen staf atau petugas pelaksana bantuan YBM Brilian adalah orang yang ahli dibidangnya. Hal ini dapat diketahui dari usaha ikan lele yang sudah jalan dan produktif.

b. Informasi

Informasi mengenai kebijakan dan peraturan harus disampaikan oleh pendamping YBM BriLian dan diketahui serta dilaksanakan oleh petani pokdakan ikan lele. Hasil wawancara dengan Bapak Asmuri Selaku Ketua Pokdakan adalah sebagai berikut:

Informasi yang diberikan oleh pendamping sudah jelas dan memberikan poin-poin yang harus ditaati, kepatuhan yang mendapatkan bantuan ini adalah setiap hasil panen wajib menabung di rekening bank bersama yang telah dibuat, misal hasil panen itu adalah Rp1.000.000, maka minimal Rp200.00, menabung, Rp300.000, buat beli bibit dan Rp500.000, buat keperluan di rumah dan uang hasil tabungan itu akan diberikan kembali. Dalam 1 bulan itu ada rapat 2 bersama pendamping misalnya adanya laporan dari masyarakat bahwa ikan lele nya mati atau ada kemalingan sehingga masalah tersebut bisa didiskusikan untuk mengatasi masalah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pokdakan disimpulkan menyebutkan bahwa ketua pokdakan dan petani lele mengetahui informasi mengenai peraturan dalam implementasi bantuan YBM BriLian terhadap petani ikan lele di Tatah Belayung.

c. Wewenang

Kewenangan yang menjadi wewenang ketua pokdakan dan petani lele harus diketahui dan dilaksanakan. Kewenangan ini dapat berupa strategi dalam menjalankan kebijakan agar lancar dan berkesinambungan. Hasil wawancara dengan Bapak Asmuri Selaku Ketua Pokdakan adalah sebagai berikut:

Wewenang pokadakan belayung mandiri, yaitu masalah penjualan itu benar-benar diatur, jangan sampai harga lele ini jatuh. Untuk mengantisipasi hal tersebut, panennya diatur sehingga lele tidak membludak di Banjarmasin, walaupun ada terjadi panen di hari yang sama maka pengepul dari Banjarbaru dipanggil agar tidak terjadi pembludakan di Banjarmasin sehingga harga lele tetap stabil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pokdakan disimpulkan menyebutkan bahwa wewenang yang diberikan oleh pendamping YBM BriLian sudah dijalankan dengan baik oleh petani ikan lele di Tatah Belayung.

d. Fasilitas

Fasilitas merupakan sarana pendukung dalam implementasi kebijakan. Tanpa adanya fasilitas yang menunjang dan mendukung (sarana

dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Hasil wawancara dengan Bapak Asmuri Selaku Ketua Pokdakan adalah mengenai fasilitas adalah sebagai berikut:

Fasilitas yang diberikan kepada pokdakan adalah berupa uang sekitar Rp76.000.000, digunakan untuk keperluan budidaya ikan sesuai anggaran belanja yang sudah ditetapkan seperti bibit, keramba pakan, galam, dan yang lainnya, dana yang dikeluarkan bertahap, yaitu 50% setelah diberikan, lalu kwitansi hasil belanja diberikan, lalu setelah 15 hari diberikan kembali 50% sisanya kepada pokdakan belayung mandiri. Nama penerima fasilitas Saya, Sabni, Yuriadi, Thamrin, Su'ada, Siti Hasinah, Zainul Hakim, Muhammad Noor, Abdul Muid, dan Mahlian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pokdakan disimpulkan menyebutkan bahwa fasilitas yang diberikan oleh pendamping YBM BriLian sudah diterima dan digunakan dengan proporsional oleh petani ikan lele di Tatah Belayung.

3. Dimensi Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan seperti sikap jujur, komitmen dan bertanggung jawab. Sikap seperti ini akan dapat mengarahkan implementor antusias dalam melaksanakan tugas dan wewenang dalam melaksanakan kebijakan sehingga tetap sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Model Implementasi Edward III berdasarkan dimensi Disposisi adalah sebagai berikut:

a. Pengangkatan Birokrat

Pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Dedikasi pendamping YBM BriLian dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Bapak Asmuri selaku petani ikan lele, yaitu:

“Layanan dari YBM BriLian dalam menjalankan program ini diadakannya pendamping yang terjun kelapangan langsung apabila ada kendala maka lapor kependamping”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pokdakan disimpulkan menyebutkan bahwa pengangkatan birokrat, yaitu Bapak Novian Supriatno sebagai pendamping YBM BriLian adalah pilihan tepat. Hal ini dapat diketahui oleh kesaksian dari petani ikan lele bahwa Bapak Novian Supriatno terjun langsung ke lapangan jika terjadi kendala.

b. Insentif

Insentif ini dapat berupa keuntungan atau pemberian bonus atau harapan yang dapat menjadi motivasi para pelaksana kebijakan untuk dapat melaksanakan perintah dengan baik. Hasil wawancara dengan Bapak Asmuri Selaku Ketua Pokdakan adalah sebagai berikut:

Harapan utamanya tetap menjalankan program ini kepada kelompok tani yang lain agar masyarakat yang awalnya kurang kuat modal dengan adanya program bantuan ini maka masyarakat menjadi lebih berkembang lagi, dalam menjalankan usahanya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pokdakan disimpulkan menyebutkan bahwa insentif berupa bantuan keuangan yang diberikan YBM BriLian membantu masyarakat yang sebelumnya kurang modal.

4. Dimensi Struktur Birokrasi

Salah satu faktor penting pencapaian dalam implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Dua karakteristik menurut Edward III yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan Standar Operating Procedur (SOP)

Standar Operating Prosedures (SOP) adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hasil wawancara dengan Bapak Asmuri Selaku Ketua Pokdakan mengenai *Standar Operating Prosedures (SOP)* adalah sebagai berikut:

Pokdakan belayung mandiri dalam menjalankan program ini berhasil dan sesuai harapan contohnya menabung rutin terus berjalan tidak ada yang macet.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pokdakan disimpulkan menyebutkan bahwa *Standar Operating Prosedures (SOP)* yang disampaikan oleh pendamping YBM BriLian sudah dijalankan dengan baik oleh petani ikan lele di Tatah Belayung. Hal ini dapat diketahui dari

keberhasilan yang diraih dan harapan yang tercapai setelah bantuan dari YBM BriLian di implementasikan.

b. Melaksanakan Fragmentasi

Pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara unit kerja. Dalam melaksanakan fragmentasi, petani ikan lele membagi anggotanya dalam dalam beberapa kelompok. Hal ini dapat diketahui pada hasil wawancara dengan Bapak Asmuri Selaku Ketua Pokdakan adalah sebagai berikut:

Untuk pembagian kerja, semua anggota ini masing-masing sudah tahu pekerjaannya. Ada yang membeli peralatan dan bibit ikan, ada yang bertugas memberi pakan, ada yang mengurus administrasi, ada juga yang bertugas mengantar ikan ke pembeli. Saya sendiri sekarang tinggal mengawasi dan menerima laporan penjualan, pembelian, dan kalau ada kendala. Kalau dulu banyak yang dikerjakan karena masih banyak yang masih pemula tapi sekarang lebih mudah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pokdakan disimpulkan menyebutkan bahwa fragmentasi sudah dilakukan dengan baik oleh petani ikan lele di Tatah Belayung.

b. Informan II

Nama : Sabni

Alamat : Jl. Tatah Belayung Ke.Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin
Selatan

Jabatan : Ketua Belayung Mandiri Berbudi Luhur atau Ketua Program
Bantuan YBM BriLian

Deskripsi hasil wawancara kepada informan I dengan model implementasi
Edward III berdasarkan dimensi komunikasi adalah sebagai berikut:

1. Dimensi Komunikasi

a. Transmisi

Hasil wawancara dengan Bapak Sabni selaku petani ikan lele di Tatah Belayung saat diberikan pertanyaan bagaimana proses ditunjuknya petani lele Tatah Belayung Kecamatan Banjarmasin Selatan sebagai penerima bantuan dari YBM BriLian mengatakan,

Saya diajak oleh Pak Asmuri. Beliau merintis usaha ikan lele pertama di sini. Melihat usaha berkembang, jadi saya diajak. Sebelum dapat bantuan, saya sudah berusaha ikan lele dengan Pak Asmuri. Karena kami satu kelompok, beliau dapat, saya juga dapat.

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa ditunjuknya Pak Sabni sebagai petani lele penerima bantuan dari YBM BriLian karena satu kelompok dengan Pak Asmuri.

b. Kejelasan

Hasil wawancara dengan Bapak Sabni selaku petani ikan lele di Tatah Belayung saat diberikan pertanyaan bagaimana kesiapan

Pokdakan Petani Lele untuk melaksanakan program bantuan YBM BriLian di Tatah Belayung mengatakan, *“Sudah siap duluan karena sudah jalan usahanya. Cari bibit bisa, pembibitan bisa, perawatan bisa, pemasaran sudah ada. Tinggal menambah bibit dan keramba.”*Berdasarkan hasil wawancara di atas, pelaksana kebijakan merupakan petani lele yang sudah terampil dan ahli dalam pengembangan budidaya ikan lele.

c. **Konsistensi**

Hasil wawancara dengan Bapak Sabni selaku petani ikan lele di Tatah Belayung mengatakan:

Sangat baik karena masyarakat terbantu dengan adanya bantuan ini masyarakat bisa mengembangkan usaha yang sudah berjalan. Tidak ada yang menurun pendapatannya dalam menjalankan program ini malah meningkat pendapatannya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bantuan dari YBM BriLian diterima dan dijalankan dengan baik oleh petani ikan lele hal ini terbukti dengan meningkatnya pendapatan petani ikan lele di Tatah Belayung setelah mengelola bantuan yang diberikan YBM BriLian.

2. **Dimensi Sumber Daya**

a. **Staf**

Hasil wawancara dengan Bapak Sabni selaku petani ikan lele di Tatah Belayung saat diberikan pertanyaan mengapa dalam pemberian bantuan YBM BriLian dilakukan oleh cabang Kota

Banjarmasin mengatakan, “*Mungkin supaya mudah memantau. Kalau jauh kan susah.*” Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemberian bantuan YBM BriLian dilakukan oleh cabang Kota Banjarmasin supaya mempermudah pengawasan pengelolaan bantuan dari YBM BriLian.

b. Informasi

Hasil wawancara dengan Bapak Sabni selaku petani ikan lele di Tatah Belayung saat diberikan pertanyaan apakah anda mendapatkan informasi yang cukup tentang program bantuan YBM BriLian kepada petani lele di Tatah Belayung mengatakan:

Jelas. informasi apa yang diberikan kepada petani lele untuk menjalankan program ini dan petani lele juga jelas dalam memberikan laporan kepada YBM BriLian.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, informasi yang diberikan oleh YBM BriLian jelas. Demikian pula, laporan tentang usaha petani lele di Tatah Belayung juga disampaikan dengan jelas kepada YBM BriLian.

c. Wewenang

Hasil wawancara dengan Bapak Sabni selaku petani ikan lele di Tatah Belayung saat diberikan pertanyaan apakah wewenang dari Pokdakan Petani Lele dalam pelaksanaan program bantuan kepada

petani lele di Tатаh Belayung mengatakan, *“Ya menerima bantuan. Kalau tugasnya jelas menggunakan bantuan untuk usaha karena budidaya ikan lele ini mata pencaharian utama saya.”* Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa petani ikan lele di Tатаh Belayung mengetahui wewenang yang diberikan oleh YBM BriLian.

d. Fasilitas

Hasil wawancara dengan Bapak Sabni selaku petani ikan lele di Tатаh Belayung saat diberikan pertanyaan apakah fasilitas yang diberikan dalam pelaksanaan program bantuan YBM BriLian kepada petani lele di Tатаh Belayung sudah cukup baik? beliau yang menyampaikan, *“Sangat baik apa yang sudah dibeli masih terpakai seperti alat timbang, keramba dan lain-lain. Dan modal yang diberikan sampai saat ini terus berputar.”* Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa fasilitas yang diberikan oleh YBM BriLian berupa peralatan usaha tepat guna dan sangat memadai.

3. Dimensi Disposisi

a. Pengangkatan Birokrasi

Hasil wawancara dengan Bapak Sabni selaku petani ikan lele di Tатаh Belayung bagaimana Bapak/Ibu terpilih menjadi petani lele di Tатаh Belayung mengatakan, *“Tidak ada syarat khusus. Semua yang*

budidaya ikan lele disebut petani lele di sini.” Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa semua orang yang budidaya ikan lele di Tatah Belayung disebut Petani Lele.

b. Insentif

Hasil wawancara dengan Bapak Sabni selaku petani ikan lele di Tatah Belayung mengatakan:

Sangat baik karena masyarakat terbantu dengan adanya bantuan ini masyarakat bisa mengembangkan usaha yang sudah berjalan. Tidak ada yang menurun pendapatannya dalam menjalankan program ini malah meningkat pendapatannya. Harapannya program ini dilanjutkan agar masyarakat kurang mampu yang lain ikut terbantu.

Berdasarkan wawancara di atas, adanya bantuan dari YBM BriLian sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya, terutama budidaya ikan lele di Tatah Belayung karena hal ini dirasakan langsung manfaatnya oleh petani ikan lele.

4. Dimensi Struktur Birokrasi

a. Melaksanakan Standar Operating Procedur (SOP)

Hasil wawancara dengan Bapak Sabni selaku petani ikan lele di Tatah Belayung saat diberikan pertanyaan menurut Anda, apakah pelaksanaan program bantuan kepada petani lele di Tatah Belayung sudah berhasil dan berjalan sesuai harapan YBM BriLian mengatakan, “*Sudah.*” Berdasarkan hasil wawancara di atas, pelaksanaan program

bantuan kepada petani lele di Tatah Belayung sudah berhasil dan berjalan sesuai harapan YBM BriLian.

b. Melaksanakan Fragmentasi

Hasil wawancara dengan Bapak Sabni selaku petani ikan lele di Tatah Belayung saat diberikan pertanyaan bagaimana pembagian kerja dalam Pokdakan ikan lele di Tatah Belayung Kecamatan Banjarmasin Selatan mengatakan, “*Melalui rapat. Hasil musyawarah rapat ditentukan siapa yang menjadi ketua dan siapa menjadi anggota kelompok.*” Berdasarkan hasil wawancara di atas, pembagian kerja dalam Pokdakan ikan lele di Tatah Belayung Kecamatan Banjarmasin Selatan melalui rapat.

B. Analisis Data

1. Implementasi Program Bantuan YBM Brilian Kepada Petani Ikan Lele di Tatah Belayung Kecamatan Banjarmasin Selatan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan beberapa informan, maka dilakukan pembahasan mengenai implementasi program bantuan YBM BriLian kepada petani ikan lele di Tatah Belayung Kecamatan Banjarmasin Selatan berdasarkan dimensi dari model implementasi Edward III. Empat dimensi yang mendukung terhadap implementasi kebijakan adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian, semua indikator dari dimensi komunikasi, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi terpenuhi dan sudah dijalankan dengan baik. Tidak ditemukan komunikasi yang tidak tersampaikan sehingga ada peraturan atau standar prosedur yang tidak terlaksana. Hal ini menandakan bahwa komunikasi dari pihak YBM BriLian kepada Ketua Pokdakan kemudian diteruskan ke petani lele dalam implementasi bantuan YBM BriLian ikan lele di Tatah Belayung Kecamatan Banjarmasin Selatan berjalan dengan lancar.

Keberhasilan implementasi bantuan YBM BriLian ikan lele di Tatah Belayung Kecamatan Banjarmasin Selatan dari segi dimensi komunikasi sejalan dengan penelitian Nursalim. Nursalim (2018: 124) mengatakan bahwa komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat kebijakan dan para pelaksana kebijakan dapat semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan.

Dengan demikian, bahwa dimensi komunikasi dalam mengimplementasikan kebijakan merupakan kunci dalam

mensosialisasikan tentang program bantuan YBM BriLian kepada petani ikan lele di Tatah Belayung Kecamatan Banjarmasin Selatan.

b. Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian, semua indikator dari dimensi sumber daya, yaitu staf, informasi, wewenang, dan fasilitas telah terpenuhi dengan baik. Staf yang ahli di bidangnya, wewenang yang dijalankan dengan baik, dan fasilitas yang diberikan tepat waktu dan sesuai dengan usaha pokdakan ikan lele. Hal ini menandakan bahwa pemberian sumber daya dari pihak YBM BriLian kepada Pokdakan ikan lele di Tatah Belayung Kecamatan Banjarmasin Selatan dilakukan dengan proporsional, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat guna.

Dengan demikian bahwa keberhasilan implementasi bantuan YBM BriLian kepada petani ikan lele di Tatah Belayung Kecamatan Banjarmasin Selatan pada dimensi sumber daya sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nursalim. Nursalim (2018: 124) mengatakan bahwa Dalam suatu kebijakan bisa saja informasi yang disampaikan sudah jelas dan konsisten tetapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah ketersediaan staf yang kompeten, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai juga anggaran dan waktu yang tepat untuk melaksanakan kebijakan sehingga pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik.

c. Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian, semua indikator dari dimensi disposisi, yaitu pengangkatan birokrasi, dan insentif telah terpenuhi dengan baik. Pengangkatan birokrasi yang ahli di bidangnya, dan insentif yang sesuai dengan harapan membuat semua pihak, baik pendamping YBM BriLian dan penerima bantuan puas. Bantuan yang diberikan YBM BriLian diberikan sepenuhnya tanpa adanya pemotongan atau biaya-biaya lain diluar prosedur yang ditetapkan. Penerima bantuan, yaitu petani ikan lele di Tatah Belayung juga menerima dan menjalankan amanah yang diberikan dengan menggunakan bantuan untuk mengembangkan usaha ikan lele.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Surat An-Nisa ayat 58, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Q. S. An-Nisa (3) : 58).

Surah An-Nisa ayat 58 memerintahkan menunaikan amanah, ditekankan bahwa amanah tersebut harus ditunaikan kepada penerimanya.

Amanah telah dilaksanakan oleh YBM BriLian sebagai pihak pemberi bantuan dan petani ikan lele sebagai pihak penerima bantuan.

Implementasi dimensi disposisi pada petani ikan lele di Tatah Belayung sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ipah Ema Jumiati. Jumiati (2014: 17) mengatakan bahwa disposisi atau sikap petugas dalam menjalankan sebuah kebijakan merupakan hal yang sangat penting dan harus dimiliki oleh implementor seperti, komitmen dan kedisiplinan petugas dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian bahwa dimensi Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan harus mempunyai semangat dalam menjalankan tugas dan berkomitmen untuk menjalankan kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yang ke empat yaitu struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan pengimplementasian kebijakan tersebut tidak akan dapat terlaksana atau terealisasi dengan baik. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif maka hal ini akan mengakibatkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya implementasi kebijakan.

Struktur birokrasi pada implementasi bantuan YBM BriLian pada Petani Ikan Lele di Tatah Belayung sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nursalim. Nursalim (2018: 125) mengatakan bahwa dimensi Struktur Birokrasi dalam pengimplementasian program, para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan, selain itu dalam mengimplementasikan kebijakan harus mengacu pada standar operasional prosedur dalam pengimplementasian kebijakan tersebut.

2. Kelebihan dan Kekurangan dalam Implementasi Program Bantuan YBM Brilian Kepada Petani Ikan Lele di Tatah Belayung Kecamatan Banjarmasin Selatan

Hasil wawancara dengan Bapa Asmuri selaku petani ikan lele di Tatah Belayung menjawab pertanyaan Apa dampak positif dari pelaksanaan program bantuan YBM BriLian kepada petani lele di Tatah Belayung adalah sebagai berikut:

Dampak positif hasil bantuan yang dibelanjakan sesuai anggaran belanja ini masih terpakai sampai saat ini contohnya keramba, timbangan, sortir, dll. Selain modal dalam menjalankan usaha budidaya ikan ini meningkat.

Sedangkan ketika Bapak Asmuri ditanya tentang Apakah Anda mendapat kesulitan dalam mendapatkan program bantuan YBM BriLian kepada petani lele di Tatah Belayung, beliau menjawab:

Tidak ada kesulitan bahkan kami dipermudah saat kami mengambil uang di bank juga dibantu dan dprioritaskan dalam hal administratif juga dibantu.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti tidak menemukan kendala dalam implementasi bantuan YBM BriLian kepada petani lele di Tatah Belayung. Kendati demikian, peneliti menemukan beberapa kendala yang pernah dihadapi oleh pokdakan petani lele di Tatah Belayung salah satunya ketergantungan pakan pelet buatan pabrik. Dimana untuk menghidupi ikan lele yang jumlahnya ribuan, para petani lele membeli pakan pelet buatan pabrik. Perlu modal yang cukup untuk dapat membeli pelet buatan hingga panen selama 4 bulan. Menurut Irfani Rahman, hal ini dimulai sejak berdirinya pokdakan ikan lele pada tahun 2017.

Hingga pada tahun 2023, petani ikan lele di Tatah Belayung berinisiatif mendapatkan pakan pelet ikan lele percuma dari jeroan ikan. Jeroan ikan sendiri sering di buang sering dianggap limbah oleh para pedagang di pasar-pasar tradisional. Akibatnya, jeroan dibuang begitu saja karena tidak berharga. Bahkan, pedagang ikan sering kali membayar petugas kebersihan untuk membuang jeroan ikan. Inisiatif ini berdampak positif, ternyata pakan jeroan ikan ini cocok dan disukai ikan lele. Hal ini tentu dapat meminimalisir pengeluaran untuk pembelian biaya pakan pelet (Lentera Kalimantan, 2023).

Kini, Pokdakan ikan lele di Tatah Belayung mendapat perhatian dari pemerintah Kota Banjarmasin. Tidak hanya bantuan dari YBM

BriLian namun juga bantuan dari Dinas Perikanan Kota Banjarmasin, yaitu berupa bibit ikan lele dan pelatihan tata boga agar hasil budidaya ikan lele dapat diolah dengan baik (Lentera Kalimantan, 2023).

Sedangkan pelatihan kepada pokdakan petani ikan lele dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DP3) Kota Banjarmasin di Tatah Belayung dengan melakukan bimbingan teknis (bimtek) pengolahan hasil perikanan kepada 50 orang pengolah pemula di Kampung Usaha Ikan Lele di Tatah Belayung. Tujuan dilaksanakan bimtek ini meningkatkan ketersediaan produk perikanan, mengoptimalkan tingkat konsumsi ikan per kapita di Kota Banjarmasin, dan meningkatkan nilai tambah produk olahan hasil perikanan (Antara Kalsel, 2023).

Kemajuan demi kemajuan dirasakan oleh petani ikan lele di Tatah Belayung. Hingga kawasan budidaya ikan lele di Tatah Belayung ini dinobatkan sebagai Kampung Lele Tatah Belayung yang diresmikan oleh Walikota Banjarmasin, yaitu Bapak H. Ibnu Sina pada tanggal 13 Juni 2023. Dasar dijadikan kawasan petani lele di Tatah Belayung sebagai Kampung Lele karena produksi rata-rata budidaya ikan lele di Tatah Belayung sebanyak 1, 5 ton per bulan dan budidaya ikan lele sekarang tidak hanya di Tatah Belayung Kelurahan Tanjung Pagar namun juga sampai ke Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan (Shalokal Indonesia, 2023).